

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses tindakan yang menjadi fokus negara-negara berkembang untuk membuat negara tersebut menjadi lebih maju, tidak terkecuali di Indonesia. Pembangunan pada hakikatnya adalah serangkaian langkah yang berkelanjutan yang terjadi secara terus-menerus dan dilakukan dengan cara yang disengaja dan terencana. Menurut Tjokroamidodo 1991 dalam Suryo (2010:3), "pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang terus menerus dan berkesinambungan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain". Menurut Mardikanto (2019: 2) "pembangunan adalah segala usaha yang secara terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk meningkatkan kehidupan yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi".

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki komitmen nasional untuk meningkatkan pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini telah diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang tahun 1945, tepatnya dalam alinea keempat. Dimana dalam alinea tersebut dikatakan komitmen nasional Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa.

Sasaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu menciptakan masyarakat Indonesia menjadi mandiri, berkembang, adil dan sejahtera dengan mendorong pertumbuhan di semua sektor, terutama dalam membangun fondasi ekonomi yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai daerah didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Oleh karena itu, memperkuat transformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan peningkatan dalam sektor infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan layanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Bappenas, 2020). Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menggerakkan kemajuan ekonomi Indonesia menuju taraf yang lebih tinggi dengan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, menurut Tjiptoherijanto pembangunan nasional yang difokuskan pada aspek ekonomi bertujuan untuk membangun fondasi yang menjadi landasan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dengan prioritas meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Iskandar et al., 2017).

Meskipun pembangunan ekonomi menjadi salah satu titik dari pembangunan nasional, akan tetapi masalah pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang menghambat proses pembangunan ekonomi (Khodijah Ishak, 2018). Indonesia berada pada posisi ke-empat sebagai negara yang menjadi populasi terbesar di dunia. Fakta ini terbukti berdasarkan tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Penduduk Indonesia

No	Nama	Nilai / Jiwa
1	2015	255.587.500
2	2016	258.496.500
3	2017	261.355.500
4	2018	264.151.600
5	2019	266.911.900
6	2020	270.203.900
7	2021	272.682.500
8	2022	275.773.800
9	2023	278.696.200

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk yang ada di Indonesia mencapai sekitar 275 773,800 juta jiwa pada tahun 2022 dengan mayoritas penduduk dalam usia produktif pada rentang 15-64 tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut tentunya diiringi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, sehingga dapat menimbulkan pengangguran karena lapangan kerja yang minim. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 143,72 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran yang ada di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022, atau setara dengan 5,86% dari total angkatan kerja nasional.

Menyelesaikan masalah mengenai pengangguran membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Menurut Siagian (2014:24) “Masalah pengangguran sungguh merupakan masalah yang sangat rumit, dikarenakan antara lain jenisnya yang beraneka ragam dan implikasinya yang bersifat multifaset yang berarti

pemecahannya pun menuntut pendekatan yang multifungsional dan lintas sektoral”. Lebih lanjut menurut Siagian (2014:27) pengangguran pada dasarnya merupakan suatu tantangan yang harus diselesaikan secara bersama yang melibatkan pemerintah, swasta maupun masyarakat, sehingga salah satu yang menjadi alasan mengapa pembangunan ekonomi menjadi salah satu pembangunan nasional yang harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Pembangunan agar dapat memenuhi prinsip berkeadilan dan merata maka membutuhkan peran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengurus daerahnya dengan melakukan berbagai macam pembangunan baik fisik maupun nonfisik berdasarkan potensi yang ada di daerahnya dengan mengarah pada salah satu tujuan utamanya yakni untuk memajukan perekonomian daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bidang industri merupakan salah satunya potensi daerah yang perlu ditingkatkan karena dapat membantu perekonomian masyarakat (Teja, 2020).

Menurut Siagian (2014:86) “Konsep industrialisasi pada dasarnya merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh negara-negara berkembang untuk melakukan pembangunan”. Alternatif yang dimaksud disini yaitu industrialisasi skala kecil dan menengah, hal tersebut dikarenakan industri kecil dan menengah dianggap dapat menyerap tenaga kerja dengan modal yang minim. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk pada kategori negara berkembang dapat memanfaatkan potensi industrinya dalam pembangunan, potensi yang dimiliki beberapa daerah di

Indonesia dan menjadi prioritas dalam pembangunan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Industri kecil dan menengah dirancang pemerintah sebagai salah satu program yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional dengan bantuan sektor usaha dalam rangka memperkuat ekonomi lokal sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Ratnasari (2011:5), yang menyatakan bahwa UKM berperan penting dalam upaya memerangi pengangguran yang terus meningkat dan menjadi sektor yang sangat potensial untuk dapat peningkatan lapangan kerja. Lebih banyak lapangan pekerjaan akan tercipta jika sektor UKM berkembang.

Tabel 1.2 Data UMKM Indonesia



Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	1,52%

*Diolah dari berbagai sumber

Sumber : Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2024

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa UMKM di Indonesia setiap tahunnya relative meningkat. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Indonesia, setara Rp. 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) perlu ditingkatkan karena tidak memerlukan modal yang besar (Widodo, 2017). Selain itu dengan adanya Industri Kecil dan Menengah (IKM) bisa memotivasi masyarakat berwirausaha dan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja, utamanya yang berada di sekitar lingkungannya. Bahkan pada krisis moneter tahun 2008, Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia sangat kuat dan tahan banting akan masalah perekonomian sehingga tetap dapat menyumbang devisa negara. IKM juga sebagai penopang ekonomi Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan berita online yang termuat dalam amarnya blog, menyatakan bahwa:

“UMKM ikut serta dalam upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia di kala krisis terjadi. Ini terbukti dengan saat krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 serta pasca pandemi Covid-19. Saat krisis tersebut terjadi, UMKM terbukti mampu bertahan dan bahkan menyelamatkan perekonomian negara dari keterpurukan yang lebih dalam. Bahkan saat pandemi Covid-19 muncul, UMKM juga mampu bergerak cepat dengan cara melakukan transformasi digital yang beralih ke e-commerce. Pada intinya, kontribusi dan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tidaklah main-main karena mampu menyelamatkan bangsa dari krisis”.

Sumber: (<https://amartha.com/blog/work-smart/kontribusi-dan-peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/> , diakses pada tanggal 19 Mei 2024)

Untuk itu diperlukan pemberdayaan dalam meningkatkan produktivitas para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yaitu Pengaturan, Pelayanan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Perlindungan. Pemberdayaan berfungsi sebagai bagian dari tugas pemerintahan, baik itu ditingkat pusat maupun

ditingkat daerah. Pemerintah memiliki peran yang aktif dalam proses pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengubah taraf kehidupan masyarakat yang kurang memiliki keterampilan untuk bergerak dari keadaan yang nyaman. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk keluar dari kondisi tersebut melalui upaya pemberdayaan yang menjadi salah satu tugas utama pemerintah. Pemberdayaan yang dilakukan dapat berupa motivasi, modal, dan bantuan pemasaran. Pemberdayaan ini diperlukan agar Industri Kecil dan Menengah (IKM) berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja khususnya dilingkungan sekitarnya.

Selaras dengan itu, menurut Mardikanto (2019:28) “Pemberdayaan merupakan salah satu jalan agar kemampuan masyarakat (menganggur, miskin, marjinal, dan terpinggirkan) dalam menyampaikan pendapat dan kebutuhannya dapat meningkat guna memperbaiki kehidupannya”. Sedangkan menurut Shardlow 1998 dalam Adi (2008:78) pada intinya pemberdayaan merupakan proses dimana individu, kelompok, atau masyarakat mengelola kehidupan mereka sendiri dan berupaya merencanakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Hal yang dapat mereka dapatkan berupa pemberian kewenangan, peningkatan partisipasi, dan pembangunan kepercayaan untuk memungkinkan setiap individu atau kelompok dapat memahami peran serta tujuan mereka dengan lebih baik. Pada akhirnya, hal tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kapabilitas kualitas

sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat sehingga dapat bersaing secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah.

Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memaparkan bahwa:

“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, sektor industri kecil dan menengah (IKM) telah menyerap tenaga kerja hingga 12,39 juta orang atau 66,25 persen dari total tenaga kerja di sektor industri. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mencatat, sepanjang 2022, sektor IKM juga telah berkontribusi sebesar 21,37 persen dari total nilai output industri pengolahan. Selama ini, IKM memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan”.

Sumber : (<https://kemenperin.go.id/artikel/23817/Sederet-Jurus-Kemenperin-Dongkrak-Daya-Saing-IKM> , diakses pada tanggal 4 Oktober 2023)

Pembangunan ekonomi lokal dapat diprioritaskan melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM). Industri yang dijumpai misalnya industri kreatif, makanan, minuman, jamu dan lain sebagainya. Salah satu Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang selalu menjadi perbincangan adalah Batik. Hal ini dikarenakan selain menjadi karya seni, batik juga menjadi industri yang menjanjikan untuk dikembangkan (Iriani et al., 2013). Selain itu, Batik menjadi warisan budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan.

Pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO telah menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan NonBendawi (*Masterpieces of The Oral and Intangible Heritage of Humanity*) (Maulana Hakim, 2018). Hal tersebut didapatkan karena batik memiliki keunikan dengan kaya akan cerita rakyat Indonesia baik dari segi makna maupun simbolnya (Rosita, 2021). Untuk itu melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober. Banyak orang yang mengagumi karya seni batik

karena batik itu unik, memiliki cerita dan memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi pewarnaan maupun dari segi motifnya (Masiswo, 2013).

Batik, yang berawal dari motif klasik yang kaya akan makna, saat ini menjadi semakin beragam dalam evolusinya dengan menggunakan sumber daya dari setiap lokasi sebagai temanya. Hal ini dapat dilihat dari ragam hias dan warna yang terinspirasi dari wilayah geografis dan adat istiadat setempat. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, bisnis kerajinan batik merupakan salah satu komponen ekonomi yang terlibat dalam masyarakat terutama dikalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Nilai budaya yang tersemat dalam batik memiliki potensi untuk menaikkan nilai tambah produk dalam industri fashion yang dianggap mampu diperjualbelikan tidak hanya di pasar domestik namun juga di pasar global, sehingga industri kerajinan batik memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian.

Jawa Timur merupakan provinsi yang dinilai menjadi salah satu wilayah dengan pengrajin batik yang cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Unit usaha batik di Jawa Timur tercatat sebanyak 5.802 yang bersumber dari beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Adapun berikut jumlah sentra industri dan unit usaha batik di Jawa Timur:

Tabel 1.3 Jumlah Sentra Industri Dan Unit Usaha Batik Di Jawa Timur

No	Tahun	Jumlah	
		Sentra Industri	Unit Usaha
1	2016	176	4708
2	2017	191	5926
3	2018	195	6357
4	2019	192	6016
5	2020	190	5802

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2018 terjadi peningkatan jumlah sentra industri dan unit usaha, namun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan. Hal tersebut terjadi karena adanya wabah pandemi covid-19. Banyaknya sentra industri yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Timur sendiri didukung dengan adanya beberapa wilayah daerah di kabupaten/kota penghasil batik yang cukup besar. Salah satu daerah penghasil batik di Jawa Timur yaitu di Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang memiliki batik khas dengan motif yang diambil dari salah satu relief candi arimbi yang terletak di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dan batik dengan ciri khas motif ringin contong yang merupakan icon dari Kabupaten Jombang itu sendiri. Berdasarkan sejarahnya, sentra batik di Kabupaten Jombang baru berkembang pada tahun 2000-an yang diperkenalkan oleh Ibu Hj. Maniati warga Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pada masa itu industri batik di wilayah ini mengalami perkembangan pesat dengan jumlah pengrajin yang semakin bertambah. Dalam hal ini pemerintah mendukung penuh potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Jatipelem atas usaha batik yang sedang ditekuni di wilayah tersebut dengan. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam mendukung usaha batik tersebut yaitu dengan melakukan pemberdayaan guna meningkatkan hasil penjualan dan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Jombang.

Tabel 1.4 Data IKM Batik di Jombang

No	Kecamatan	Jumlah IKM Batik
1.	Mojoagung	10
2.	Diwek	8
3.	Perak	1
4.	Jombang	3

No	Kecamatan	Jumlah IKM Batik
5.	Peterongan	2
6.	Gudo	1

Sumber: Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2023

Berdasarkan Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang,

industri kecil dan menengah (IKM) Batik yang ada di Kabupaten Jombang berjumlah 25 IKM Batik yang tersebar di enam kecamatan. Dimana pada Kecamatan Mojoagung terdapat 10 IKM Batik, Kecamatan Diwek terdapat 8 IKM Batik, Kecamatan Perak 1 IKM Batik, Kecamatan Jombang memiliki 3 IKM Batik, Kecamatan Peterongan 2 IKM Batik dan pada Kecamatan Gudo memiliki 1 IKM Batik. Pada penelitian ini penulis mengambil lokus di sentra Kecamatan Diwek tepatnya di Desa Jatipelem karena di desa tersebut merupakan desa penghasil kerajinan batik pertama di Kabupaten Jombang. Selain itu pada tahun 2020, 13 pengrajin batik di Jombang mendapatkan apresiasi kreator batik dari Dekranasda Jawa Timur. Dan dari 13 pengrajin tersebut 5 diantaranya pengrajin batik yang berasal dari Desa Jatipelem. Di sentra Desa Jatipelem Kecamatan Diwek sendiri terdapat 7 IKM Batik yang selalu memproduksi hingga sampai saat ini. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tabel yang diperoleh penulis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang di bawah ini:

Tabel 1.5 Data IKM Batik Desa Jatipelem

No	Nama IKM	Jumlah Pegawai	Alamat IKM
1	Batik New Colet	12	Dsn. Pelem NO.55 RT.04 RW.01 Ds. Jatipelem Kec. Diwek Kab. Jombang Jawa Timur
2	Batik Sekar Jati	4	Ds. Jatipelem 37, Kec. Diwek Jombang, Jawa Timur
3	Batik Sekar Jati Star	3	Dsn. Pelem Desa Jatipelem Kecamatan Diwek

No	Nama IKM	Jumlah Pegawai	Alamat IKM
4	Jatining Cahyo Batik	2	Dusun Pelem RT 001 RW 001 Desa Jatipelem Kecamatan Diwek
5	Batik Hadi Siswo	4	Dsn. Pelem RT/RW 001/001 Ds. Jatipelem, Kec. Diwek
6	Banyumili Batik	1	Dsn. Pelem RT 002 RW 001, Desa Jatipelem, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur
7	Batik Abdhan	1	Dusun Pelem RT 003 RW 001 Desa Jatipelem Kecamatan Diwek

Sumber : Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2023

Tabel diatas menunjukkan jumlah IKM Batik yang terdapat di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek berjumlah 7 IKM Batik dan dapat menyerap 27 pegawai. Berdasarkan observasi awal penulis tenaga kerja atau pengrajin batik berasal dari lingkungan sekitar Desa Jatipelem itu sendiri dan dominan dilakukan oleh ibu-ibu yang mencari tambahan penghasilan. Tujuh IKM batik di Desa Jatipelem sampai saat ini masih terus memproduksi. Untuk itu pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan pemberdayaan guna menjaga eksistensi batik khas Jombang agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan persaingan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih.

Pemberdayaan industri kecil dan menengah batik merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, adanya pemberdayaan IKM Batik oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang ini bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti pengangguran. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang juga memiliki peran sebagai

fasilitator dalam memberdayakan industri kecil dan menengah tersebut. Pada dasarnya program yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang merupakan instruksi dari Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Selain itu juga tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 72 Tentang Perindustrian yang menyebutkan bahwa :

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam kemiskinan melalui kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor sehingga untuk dapat mewujudkan itu semua maka dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas”.

Dalam melakukan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Batik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melakukan dorongan berupa motivasi yang diberikan kepada para pengrajin batik untuk terus meningkatkan potensi produktivitas batik. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang juga melakukan pembukaan peluang akses pasar melalui pameran batik dalam memperkuat IKM Batik di Desa Jatipelem, hal tersebut diperlukan agar IKM Batik di Desa Jatipelem dapat tetap eksis ditengah persaingan pasar yang semakin modern. Selain itu juga terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam melindungi dari penjiplakan motif batik. Perlindungan tersebut berupa pemberian HKI cipta merk kepada para pengrajin batik di Desa Jatipelem Kabupaten Jombang.

Berdasarkan latar belakang akan pesatnya potensi industri kecil dan menengah (IKM) Batik di Desa Jatipelem, maka diperlukan adanya pemberdayaan pada IKM

Batik di Desa Jatipelem. Menurut Kartasasmita dalam buku Mardikanto (2019) aspek pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa indikator, yaitu (1) Menciptakan (*Enabling*); (2) Memperkuat (*Empowering*); (3) Melindungi (*Protecting*). Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dengan judul **“Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Batik Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Desa Jatipelem Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, perumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Proses Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Batik Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Desa Jatipelem Kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu “Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Batik Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Desa Jatipelem Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pemahaman, pengetahuan, dan kajian bagi pembaca

terkait pemberdayaan industri kecil dan menengah batik oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di Desa Jatipelem Kabupaten Jombang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat memperdalam pengetahuan tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Batik Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Desa Jatipelem Kabupaten Jombang
 - b. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik
2. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang untuk menjalankan perannya guna membantu para pelaku IKM Batik di Desa Jatipelem.
3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil atau temuan dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pemberdayaan industri kecil dan menengah batik oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di Desa Jatipelem Kabupaten Jombang.